

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja ( RENJA ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan didalam dokumen Rencana Strategis ( RENSTRA ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016 – 2021. Rencana Kerja ( RENJA ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran 2 indikator yaitu % Desa yang mendapatkan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan % Pembinaan terhadap LSM, Ormas, OKP dan Partai Politik.

Dalam kontek perencanaan pembangunan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani / memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dituntut untuk siap dan sanggup membuat / menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017 didasarkan kepada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016 – 2021 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( Ranwal RKPD ) Tahun 2016, agar di dalam pelaksanaan program / kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2017 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pacitan disusun berdasarkan :

1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
4. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas , Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan.
8. Pola dasar Pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2016 – 2021.
9. Rencana Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

## **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017 disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

Adapun Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melakukan aktivitas di Kabupaten Pacitan, sehingga terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

#### **1.4. Sistematika**

Rencana Kerja Bakesbang Pol Kabupaten Pacitan Tahun 2017, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **1.1. Latar Belakang**

Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja

#### **1.2. Landasan Hukum**

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Bakesbang Pol Tahun 2015.

#### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

Menggambarkan kajian ( review ) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu ( Tahun – 2 ) dan perkiraan capaian tahun berjalan ( n – 1 )

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Menjelaskan yang menyangkut arah dan dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD

#### **3.2. Tujuan Dan Sasaran renja SKPD**

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

#### **3.3. Program dan Kegiatan**

Menjelaskan faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

### **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan catatan – catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

Pada Tahun 2016 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan perumusan, penyusunan, pelaksanaan / pembinaan dan evaluasi kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan, hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017.

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Pacitan Tahun 2016 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2016 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu Kebijakan perencanaan program & kegiatan, Pelaksanaan rencana program dan kegiatan serta hasil rencana program dan kegiatan.

Dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2016, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran–sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan–kebijakan dalam pelaksanaannya;

Disamping itu penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2016, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2015 sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan tahun 2016;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan sampai dengan akhir tahun 2015, sebagaimana tersebut tabel 2.1 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja SKPD dan pencapaian renstra SKPD sampai dengan Tahun 2015, terlampir.

Dari tabel 2.1 tersebut, terlihat bahwa hampir semua program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2015 terealisasi 100 persen dari yang ditargetkan pada tahun 2015. Meskipun demikian terdapat beberapa hal yang harus dicermati, yaitu :

- a. Efisiensi anggaran;
- b. Perencanaan yang kurang optimal, sehingga penyerapan anggaran yang dialokasikan tidak sesuai waktu yang dijadwalkan (kejar tayang di belakang); dan
- c. Terbatasnya alokasi anggaran yang diberikan, sehingga tidak semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan.

Khusus untuk program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, tidak pernah dianggarkan mengingat program dan kegiatan ini sudah dianggarkan pada Badan Kepegawaian dan Diklat, untuk seluruh SKPD.

Sehubungan dengan hal diatas, maka pengelolaan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia harus terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar kapasitas personil baik individu maupun tim/kelompok bisa ditingkatkan dan dikembangkan secara lebih profesional, proaktif dan kolektif/tim, sehingga diharapkan dimasa akan datang menjadi personil yang mumpuni dan kapabel bagi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik. Kapasitas ideal yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan sumber daya manusia/aparatur antara lain mencakup lima aspek masing-masing :

1. Kapasitas untuk berkreasi atau berproduksi;

2. Pemerataan distribusi komposisi personil sesuai kapasitas dan kualifikasinya;
3. Pemberian keleluasaan dan wewenang;
4. Kesempatan untuk berkembang (*development*);
5. Kesadaran akan interdependensi.

Lima aspek pengelolaan sumber daya manusia di atas dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan, karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan mumpuni menjadi modal utama dan potensial dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai sub ordinansi dari organisasi Pemerintah Kabupaten Pacitan, memandang perlu untuk melaksanakan peningkatan kapasitas, kualitas dan kuantitas personel ini.

Untuk mendukung pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pelaksanaan rekrutmen yang selektif didasarkan pada kecakapan fisik dan mental serta latar belakang pendidikan yang memadai, yang ditunjang dengan mekanisme pendidikan dan pelatihan pegawai pada program Diklat Penjejang maupun Diklat Fungsional Pemerintah Daerah.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu merumuskan kebijakan teknis bidang Sekretariat, Bidang politik dalam Negeri, bidang Kewaspadaan , dan bidang Integrasi Bangsa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan selalu proaktif, kreatif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai inovator dan motivator, meski pada dasarnya juga memiliki kewenangan eksekutor, seperti pengawasan, penghentian operasional suatu usaha/kegiatan hingga penyidikan pada Keamanan dan ketertiban Masyarakat.

Hal ini tercermin pada beberapa program dan kegiatan yang telah, sedang dan akan dilanjutkan, seperti *online* sistem perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.



**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan**  
**Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan**

**Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcomes ) / Kegiatan ( Output )	Target Capaian Kinerja Program ( Renstra SKPD ) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2014 ( n - 3 )	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu ( n - 2 )			Target program dan kegiatan ( Renja SKPD tahun 2016 ( n - 1 )	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
								Target Renja SKPD tahun 2015 ( n - 2 )	Realisasi Renja SKPD tahun 2015 ( n - 2 )	Tingkat Realisasi ( % )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan ( tahun n - 1 )	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ( % )
1	2				3	4	5	6	7	8 =( 7/6 )	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	19			Urusan Pemerintahan									
1	19	01		Bidang Urusan Kesbang Pol									
1	01	19	01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									
		01	19	Kegiatan Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Tersedianya honor dan biaya operasional	99 %	99 %	99%	99 %	100%	99%	99%	100%
1	01	19	02	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana</b>									
		02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tercukupinya computer, Lap Top dan AC	99%	99%	99%	99%	100%	99%	99%	100%

		02	08	<b>Pengadaan Peralatan gedung Kantor</b>	Tercukupinya Peralatan Kantor Almari, Meja dan Kursi	99%	99%	99%	99%	100%	99%	99%	100%
1	01	19	06	<b>Program Peningkatan Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>									
		06	09	Kegiatan Monitoring dan evaluasi ( termasuk LAKIP dan Penilaian mandiri )	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Program Kegiatan	99%	99%	99%	99%	100%	99%	99%	100%
		19	15	<b>Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>									
		15	08	Kegiatan Komunitas Intelegen Daerah ( KOMINDA )	Terlaksananya koordinasi antar unsur pimpinan dan unsur intelegen dalam keanggotaan KOMINDA di daerah	100	80%	100%	100%	100%	100%	2.8 %	2.8%
		15	09	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat ( PAKEM ) Kab. Pacitan	Terlaksananya sosialisasi di wilayah / kecamatan	100	80%	100%	100%	100%	100%	2.8%	2.8%
		15	10	Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terlaksananya koordinasi dalam kegiatan informasi konflik di wilayah	100	80%	100%	100%	100%	100%	2.8%	2.8%
		15	11	Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	Terlaksananya monitoring dan validasi data keberadaan Orang Asing dan Lembaga Asing di wilayah	100	80%	100%	100%	100%	100%	2.8%	2.8%
		15	12	Oprasional Tim Terpadu penanganan Gangguan kamanan Dalam Negeri	Terselenggaranya kegiatan penanganan gangguan keamanan	100	80%	100%	100%	100%	100%	2.8%	2.8%

		01	17	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Forum Penyelenggaraan antar kelompok</b>								
		17	04	Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama	Terlaksananya sosialisasi di wilayah / kecamatan	100	80%	100%	100%	100%	100%	2.8%	2.8%
		17	05	Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bg Tokoh pemuda, Ormas dan Tomas	Terlaksananya sosialisasi di wilayah / kecamatan	100	80%	100%	100%	100%	100%	2.8%	2.8%
		17	06	Kegiatan Sosialisasi Pembauran Kebangsaan	Terlaksananya koordinasi dalam kegiatan informasi konflik di wilayah	100	80%	100%	100%	100%	100%	2.8%	2.8%
		17	'07	Sosialisasi Hak Asasi Manusia	Terlaksananya sosialisasi di wilayah / kecamatan	100	80%	100%	100%	100%	100%	2.8%	2.8%
		17	08	Sosialisasi Bahaya Radikalisme dan Terorisme dikalangan pemuda, Pelajar, Mahasiswa dan tokoh masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi	100	80%	100%	100%	100%	100%	2.8%	2.8%
		19	21	<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>									
		21	01	Pembinaan Organisasi kemasyarakatan	Terwujudnya Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	100	100%	100%	100%	100%	100%	3 %	3%
		21	02	Forum lintas Parpol	Terselenggaranya Konsolidasi anatar Parpol	100	100%	100%	100%	100%	100%	3 %	3%
		21	03	Fasilitasi Bantuan keuangan Kepada Parpol	Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada Parpol	100	100%	100%	100%	100%	100%	3 %	3%

		21	04	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam pemilu	Terlaksananya Koordinasi antar Tim	100	100%	100%	100%	100%	100%	3 %	3%
		21	05	Fasilitasi Organisasi kemasyarakatan	Terlaksananya Pendataan, komunikasi dan konsultasi aparat dengan orkesmas	100	100%	100%	100%	100%	100%	3 %	3%
		21	06	Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Pemilu	Terlaksananya koordinasi antar tim	100	100%	100%	100%	100%	100%	3 %	3%

Pacitan, Januari 2016  
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PACITAN**

**SUHARYANTO,SH.,MM**  
**NIP. 19590530 197901 1001**

**TABEL 2.2**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN PACITAN**

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian						Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	% Penduduk yang mendapatkan pembinaan Wawasan Kebangsaan.			54.590	54.590	109.180	163.770	218.360	272.950	54.590	54.590	109.180	163.770	218.360	<b>272.950</b>	
2.	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, OKP dan Partai Politik.			20	20	40	60	80	100	20	20	40	60	80	<b>100</b>	
3.	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah			20	20	40	60	80	100	20	20	40	60	80	100	
4.	Jumlah LSM			49	53	55	57	59	61	49	53	55	57	59	61	

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Beberapa hal yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

- a. Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap fasilitas dan pelayanan publik

Hingga sekarang ini kualitas pelayanan publik masih diwarnai oleh pelayanan yang kurang dapat diakses merupakan indikator rendahnya kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pacitan. Di mana hal ini juga sebagai akibat dari berbagai permasalahan pelayanan publik yang belum dirasakan optimal oleh rakyat.

Pada dasarnya pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, tepat, manusiawi, murah, tidak diskriminatif, dan transparan. Selain itu pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, namun upaya-upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah nampaknya belum optimal. Salah satu indikator yang dapat dilihat dari fenomena ini adalah pada fungsi pelayanan publik yang banyak dikenal dengan sifat birokratis dan banyak mendapat keluhan dari masyarakat karena masih belum memperhatikan kepentingan masyarakat penggunaannya. Masyarakat yang seharusnya menjadi pengontrol pemerintah, belum bisa menjalankan fungsinya dengan maksimal. Pemahaman masyarakat terhadap UU Pelayanan Publik dinilai masih minim. Dengan demikian reformasi birokrasi dan pelayanan publik tetap diperlukan agar dapat mengantisipasi perubahan lingkungan, paradigma dan kemajuan teknologi.

- b. Masih rendahnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan.

Berdasarkan teori ekonomi, salah satu sumberdaya pembangunan yang sangat penting adalah sumber daya manusia (SDM). Sebagai salah satu faktor produksi, kualitas SDM akan sangat mempengaruhi output/produksi suatu perekonomian, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Salah satu jalan untuk meningkatkan kualitas SDM adalah

pendidikan dan peningkatan pelayanan kesehatan. PBB sudah menetapkan Millenium Development Goals (MDGs) yang salah satunya adalah semangat untuk mengurangi jumlah kemiskinan dan pengangguran serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak serta peningkatan daya beli.

c. Kualitas Sumber Daya Manusia

Upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia bagi aparatur sangat diperlukan untuk dapat menunjang keberhasilan kegiatan sehingga dapat mewujudkan Good Governance (Pemerintahan yang Baik), hal itu dapat dilakukan dengan:

1. Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengikuti diklat atau pelatihan
2. Memberikan beasiswa pendidikan kepada yang berprestasi.
3. Memberikan penghargaan kepada yang berprestasi dan hukuman kepada yang melanggar peraturan (reward and punishment).
4. Mekanisme kenaikan jabatan berdasarkan pangkat dan masa kerja harus dikaji ulang karena hasilnya tidak maksimal bagi kemajuan SKPD, seharusnya kenaikan jabatan didasarkan pada kinerja aparat pemerintah sehingga nantinya dapat mempertanggung jawabkan jabatannya

d. Jumlah Personil

Untuk Peningkatan Keamanan dan Ketertiban di masyarakat diperlukan perluasan jaringan intelijen dan pengembangan sistem deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik di masyarakat, untuk itu diperlukan penambahan jumlah personil jaringan intelijen di tingkat kecamatan dan desa untuk memperoleh informasi tentang kerawanan konflik sehingga dapat segera diantisipasi untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif di wilayah Kabupaten Pacitan

## **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review rancangan awal renja SKPD Tahun 2015, sebagaimana tersebut pada tabel (terlampir).

### **2.4.1. Belanja Tidak langsung**

Belanja Pegawai ( Gaji dan TPP ) sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp. 1.700.767.620,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.575.914.110 ( 92,6 % ) dengan sisa anggaran Rp. 124.853.510,-

### **2.4.2. Belanja Langsung**

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

##### **- Kegiatan Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 520.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 519.764.323,- ( 99,9%) dengan sisa anggaran Rp. 235.677,-

#### **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

##### **- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 49.863.550,- (99,7%) dengan sisa anggaran Rp 136.450,-

##### **- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 49.639.300,- (99,2%) dengan sisa anggaran Rp 360.700,-

#### **3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**

##### **- Monitoring dan Penilaian LAKIP dan Penilaian Mandiri**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.000.000,- (100%) dengan sisa anggaran Rp . 0,-



#### **4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**

- ***Komunitas Intelegend Daerah ( KOMINDA )***.Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 890.000.000,- dan terealisasi Rp. 888.252.000,- ( 99,8% ) dengan sisa anggaran Rp . 1.748.000,-
  
- ***Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pacitan***  
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- dan terealisasi Rp. 49.820.000,- ( 99,64% ) dengan sisa anggaran Rp . 180.000,-
  
- ***Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ( FKDM )***  
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- dan terealisasi Rp. 49.759.950,- ( 99,5% ) dengan sisa anggaran Rp . 240.050,-
  
- ***Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing***  
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- dan terealisasi Rp 49.994.850,- ( 99,9 % ) dengan sisa anggaran Rp. 5.150-
  
- ***Oprasional Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri***  
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- dan terealisasi Rp 149.958.210,- ( 99,9 % ) dengan sisa anggaran Rp. 41.790,-

#### **5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**

- ***Forum kerukunan Antar Umat Beragama***  
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 88.675.000.000,- dan terealisasi Rp. 88.444.900,- ( 99,7 % ) dengan sisa anggaran Rp. 230.100,-

- **Sosialisasi Wawasan Kebangsaan**  
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 95.000.000,- dan terealisasi Rp. 92.309.575,- (97,16 % ) dengan sisa anggaran Rp. 2.690.425,-
- **Sosialisasi Pembauran Kebangsaan**  
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 50.000.000,- dan terealisasi Rp 49.865.200 ,- ( 99,7% ) dengan sisa anggaran Rp. 134.800,-
- **Sosialisasi HAM**  
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 55.000.000,- dan terealisasi Rp 52.727.900,- ( 95,8% ) dengan sisa anggaran Rp. 2.272.100,-
- **Sosialisasi Bahaya Radikalisme dan Terorisme dikalangan Pemuda, Pelajar, Mahasiswa dan Tokoh Masyarakat**  
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.000.000,- dan terealisasi Rp 19.745.000,- ( 98,7% ) dengan sisa anggaran Rp. 255.000,-

## 6. Program Pendidikan Politik Masyarakat

- **Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan**  
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 50.000.000,- dan terealisasi Rp 49.629.770,- ( 99,2%) dengan sisa anggaran Rp.370.230,-
- **Forum Lintas Parpol**  
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 50.000.000,- dan terealisasi Rp 49.993.585,- ( 99,9%) dengan sisa anggaran Rp. 6.415,-
- **Fasilitasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Parpol**  
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 115.000.000,- dan terealisasi Rp. 114.696.435,- ( 99,7%) dengan sisa anggaran Rp. 303.565,-

- ***Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam pemilu***  
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 150.000.0000,- dan terealisasi Rp. 149.757.145,- ( 99,8%) dengan sisa anggaran Rp. 242.855,-
- ***Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan***  
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 75.000.000,- dan terealisasi Rp. 74.634.900,- ( 99,5%) dengan sisa anggaran Rp. 365.000,-
- ***Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Pemilu***  
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 475.000.000,- dan Terealisasi Rp. 474.163.400,- (99,8 %) dengan sisa anggaran Rp. 836.600,-

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan dan menjadi prioritas utama pada forum musyawarah perencanaan pembangunan-satuan kerja perangkat daerah (Forum Musrenbang-SKPD) berasal dari

1. Usulan dari kecamatan Bandar untuk dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada tahun 2012.
2. Usulan dari kecamatan Sudimoro untuk Forum kerukunan Umat Beragama pada tahun 2012.
3. Usulan dari kecamatan Kebonagung untuk Peningkatan Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu legislatif dan pemilu Presiden pada tahun 2012.



### **3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Pacitan. Oleh karena itu, Rencana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pacitan, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2010-2015, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Jawa Timur 2005–2025, RPJM Provinsi Jawa Timur 2009–2014, RKPD Provinsi Jawa Timur 2012; dan RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021 dan RKPD Kabupaten Pacitan 2017.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

#### **3.2.1. Tujuan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Mewujudkan profesionalisme aparatur.
2. Terwujudnya kondisi dan tatanan kehidupan sosial politik yang demokratis, mantap, stabil dan dinamis berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Terwujud dan tersalurkannya Organisasi dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan iklim politik yang kondusif.
4. Terwujudnya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban melalui peran aktif masyarakat.

### **3.2.2 Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria "SMART". Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2016 – 2021 adalah: .

1. Peningkatan Kinerja Aparatur untuk Mewujudkan Pelayanan Prima
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Mempunyai Kepedulian dan Berwawasan Kebangsaan
5. Menciptakan Kerjasama dalam Kehidupan Berpolitik dan Harmonis antara Aparat, Masyarakat dan Swasta
6. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat

### 3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan Tujuan dan Sasaran, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memerlukan Strategi dan faktor-faktor pendukung serta memperhatikan potensi peluang dan kendala yang mungkin timbul, sebagaimana tersebut dalam analisa **SWOT** sebagai berikut:

1. Strategi S – O (Kekuatan – Peluang) ; memanfaatkan kekuatan untuk menangkap peluang.
2. Strategi S – T (Kekuatan – Ancaman) ; menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman.
3. Strategi W – O (Kelemahan – Peluang) ; memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan.
4. Strategi W – T (Kelemahan – Ancaman) ; meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

Berdasarkan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, maka dapat digambarkan faktor internal dan eksternal organisasi sangat berpengaruh serta faktor kunci keberhasilan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan tercermin dalam pendekatan analisis SWOT sebagai berikut :

1. Faktor Lingkungan Internal Organisasi
  - a. Kekuatan (strenght)
    1. Adanya peraturan perundangan, petunjuk teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan kinerja.
    2. Adanya kelembagaan yang mandiri dilengkapi dengan tugas pokok dan fungsi.
    3. Tersedianya anggaran dalam melaksanakan kinerja
  - b. Kelemahan (Weakness)
    1. Terbatasnya sarana dan prasarana
    2. Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang terbatas
    3. Koordinasi antar lembaga yang masih lemah
2. Faktor Lingkungan Eksternal Organisasi
  - a. Peluang (opportunities)
    1. Meningkatnya kesadaran masyarakat atas hak nya untuk

- mendapatkan keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Adanya dukungan program dari pusat maupun propinsi
  3. Adanya tuntutan Keamanan sebagai kebutuhan dasar.
- a. Ancaman (threats)
1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
  2. Laju Perkembangan kehidupan sosial kemasyarakatan semakin kompleks tidak sebanding usaha pencegahan, pemulihan keamanan masyarakat.
  3. Jumlah penduduk yang semakin bertambah memicu peningkatan Instabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah kabupaten pacitan.



**MATRIK ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL**

<p align="center"><b>FAKTOR</b> <i>INTERNAL</i></p> <p align="center"><b>FAKTOR EKSTERNAL</b></p>	<p align="center"><b>KEKUATAN (STRENGHT)</b></p>	<p align="center"><b>KELEMAHAN (WEAKNESS)</b></p>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya peraturan perundangan, petunjuk teknis, sebagai pedoman dalam pelaksanaan kinerja pada BakesbangPol.</li> <li>2. Adanya kelembagaan yang mandiri dilengkapi dengan tugas pokok dan fungsi pada BakesbangPol.</li> <li>3. Tersedianya anggaran dalam melaksanakan kinerja pada BakesbangPol.</li> </ol>
<p align="center"><b>PELUANG (OPPORTUNITIES)</b></p>	<p align="center"><i>SO</i></p>	<p align="center"><i>WO</i></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kesadaran masyarakat atas hak nya untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat</li> <li>2. Adanya dukungan program baik dari pusat maupun propinsi</li> <li>3. Adanya tuntutan Keamanan sebagai kebutuhan dasar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengan adanya Peraturan perundangan Pada pada BakesbangPol dapat meningkatkan kesadaran masyarakat menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban.</li> <li>2. Adanya kelembagaan yang mandiri dilengkapi dengan tugas pokok dan fungsi pada BakesbangPol Merealisasikan tuntutan kemanan dan ketertiban sebagai kebutuhan dasar</li> <li>3. Adanya anggaran pada Bakesbang pol dapat merealisasikan program baik dari pusat maupun</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat sadar atas haknya untuk menjaga keamanan dan ketertiban walaupun Dengan sarana yang terbatas pada BakesbangPol.</li> <li>2. Tuntutan keamanan sebagai kebutuhan dasar dapat terwujud meskipun keterbatasan SDM pada BakesbangPol .</li> <li>3. Adanya dukungan dari propinsi dan pusat dapat meningkatkan koordinasi antar</li> </ol>

	Propinsi	lembaga yang masih lemah pada BakesbangPol.
<b>ANCAMAN (THREATS)</b>	<i>ST</i>	<i>WT</i>
<p>1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban</p> <p>2. Laju Perkembangan kehidupan sosial kemasyarakatan semakin kompleks tidak sebanding usaha pencegahan, pemulihan keamanan masyarakat.</p> <p>3. Jumlah penduduk yang semakin bertambah memicu peningkatan Instabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah kabupaten pacitan.</p>	<p>1. Adanya peraturan perundangan dan petunjuk teknis pada Badan Kesbang pol dapat menekan masyarakat yang kurang menyadari tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban.</p> <p>2. Tersedianya anggaran pada Badan Kesbang pol untuk kegiatan pengamanan dapat menghambat laju perkembangan sosial yang semakin kompleks</p> <p>3. Kelembagaan mandiri yang dilengkapi tugas pokok dan fungsi pada Badan Kesbang pol yang jelas dapat menekan instabilitas keamanan dan ketertiban seiring dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah.</p>	<p>1. Sarana dan prasaran yang terbatas pada BakesbangPol apabila dioptimalkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan keamanan dan ketertiban.</p> <p>2. Sumber daya manusia yang masih terbatas pada BakesbangPol apabila dipotimalkan dapat mencegah laju perkembangan kehidupan sosial kemasyarakatan yang semakin kompleks</p> <p>3. Koordinasi pada BakesbangPol tentang keamanan dan ketertiban apabila ditingkatkan dapat mengurangi peningkatan instabilitas.</p>

### 3.3.1 VISI DAN MISI

#### 3.3.1.1 VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Pacitan 2016-2021, maka visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan 2016 – 2021 adalah:

***Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan adalah***

**“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG  
DEMOKRATIS, BERSATU, AMAN DAN DAMAI DALAM WADAH  
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

Diharapkan dengan terumuskannya visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen dinas untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

**3.3.1.2 MISI**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan 2016– 2021 adalah sebagai berikut :

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2016 – 2021, yaitu :

1. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional;
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang HAM, Pembauran, Idiologi dan Wawasan Kebangsaan sebagai bagian dari Peningkatan Ketahanan Kebangsaan ;
3. Mendorong peran aktif Partai Politik Legeslatif dan Organisasi Kemasyarakatan dalam menjaga Keamanan dan Kedamaian dalam Masyarakat ;

4. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Nilai – Nilai Kesatuan Bangsa, Sosial Kemasyarakatan

Adapun tujuan yang telah ditetapkan oleh Bakesbang Pol dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

#### **3.3.1.3 Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan.

Adapun rumusan tujuan di dalam rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2016 adalah :

1. Mewujudkan profesionalisme aparatur.
2. Terwujudnya kondisi dan tatanan kehidupan sosial politik yang demokratis, mantap, stabil dan dinamis berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Terwujud dan tersalurkannya Organisasi dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan iklim politik yang kondusif.
4. Terwujudnya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban melalui peran aktif masyarakat.

#### **3.3.1.4 Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Masyarakat dalam jangka waktu satu tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2016 adalah: .

1. Peningkatan Kinerja Aparatur untuk Mewujudkan Pelayanan Prima
2. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Mempunyai Kepedulian dan Berwawasan Kebangsaan
3. Menciptakan Kerjasama dalam Kehidupan Berpolitik dan Harmonis antara Aparat, Masyarakat dan Swasta

### **3.4 CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN**

Dari pengalaman pelaksanaan tugas sampai saat ini, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan maupun hambatan dalam pelaksanaan program / kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan. Berdasarkan hal tersebut dan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik , cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dapat dirumuskan melalui :

#### **3.4.1 Kebijakan**

Kebijakan merupakan strategi yang di dalamnya berisi kumpulan keputusan-keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi dilaksanakan, juga mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan serta mengarahkan pada kondisi dimana setiap pelaksana di organisasi apakah memperoleh dukungan untuk mengimplementasikan keputusan-keputusan tersebut.

Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran pada badan kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

1. Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM aparatur yang sesuai kebutuhan.
2. Penyediaan sarana prasarana kerja yang memadai.
3. Pelaporan tepat waktu efektif, efisien, transparan dan akuntable
4. Pelatihan bagi aparatur untuk meningkatkan kemampuan dalam menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan
5. Koordinasi dan komunikasi yg aktif antar instansi terkait dengan lembaga keagamaan dan kepercayaan

6. Melibatkan masyarakat dalam menentukan metode yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan dan sosialisasi
7. Peningkatan pembinaan lembaga non pemerintahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
8. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan dalam pemantauan keberadaan parpol
9. Peningkatan operasional Kominda
10. Peningkatan operasional penanganan gangguan keamanan dalam negeri

### **3.4.2 Program**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang di koordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Program merupakan rencana tindak (action plan) yang terdiri dari kegiatan – kegiatan spesifik yang harus dilaksanakan untuk mencapai masing – masing sasaran.

Sesuai dengan Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
6. Program Pendidikan Politik Masyarakat

### **3.4.3 RENCANA KERJA TAHUN 2017**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan serta guna mencapai sasaran yang dituju maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyusun Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017 sebagaimana terlampir di bawah ini :

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD</b>			<b>550,000,000</b>	
Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Oprasional pengelolaan administrasi perkantoran yang baik	Kab. Pacitan	12 bulan	550,000,000	
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tingkat pemenuhan dan kebutuhan dan peeliharaan saran dan prasarana kerja sesuai dengan standar daerah</b>			<b>50,000,000</b>	
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tercukupinya Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Pacitan	100%	50,000,000	-



<b>Program Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan</b>	<b>% tertib laporan akuntabilitas kinerja pemerintah</b>		100%	<b>25,000,000</b>	
Monitoring , Panilaian LAKIP dan Penilaian Mandiri	Terpantauanya Terevaluasi Penyusunan LAKIP, RENSTRA dan RENJA	Kab. Pacitan	3 dokumen	25,000,000	
<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>Terciptanya Kemanan dan ketertiban di Kab. Pacitan</b>			<b>1,150,000,000</b>	
Komunitas Intelijend Daerah ( KOMINDA )	Terlaksananya Koordinasi antar Unsur Pimpinan dan Unsur Intelijend dalam Keanggotaan dilaksanakan 12 bulan	Kab. Pacitan	12 bulan	850,000,000	
Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat ( PAKEM )	Terselenggaranya sosialisasi PAKEM dilaksanakan 12 x 50 orang	Kab. Pacitan	200 orang	50,000,000	
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ( FKDM )	Terselenggaranya FKDM dilaksanakan 5 x 50 orang	Kab. Pacitan	250 orang	50,000,000	
Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing ( NGO )	Terlaksannya Sosialisasi dan Monitoring Keberadaan Orang Asing dan Lembaga Asing dilaksanakan 7 x 12 bulan	Kec. Arjosari. Kec. Pacitan.	7 x 12 bulan	50,000,000	

Oprasional Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri	Terlaksananya Stabilitas Kemanan Daerah 12 x 12 bulan	Kec. Sudimoro, Kec. Punung, Kec. Ngadirojo, Kec. Tulakan, dan kec. Pringkuku  Kab. Pacitan	12 bulan	150,000,000
<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>				<b>465,000,000</b>
Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB )	Terlaksananya Sosialisasi FKUB di Kecamatan dan Oprasional FKUB dilaksanakan 3x dalam setahun	Kab. Pacitan	Orang	90,000,000
Sosialisasi wawasan Kebangsaan bg Tokoh Pemuda, Ormas dan Tomas	Terselenggaranya Sosialisasi Wawasan kebangsaan dilaksanakan 3x sosialisasi dan 2x seminar	Kab. Pacitan	orang	95,000,000
Sosialisasi Pembauran Kebangsaan	Terselenggaranya Sosialisasi pembauran kebangsaan dilaksanakan 3x 40 orang	Kab. Pacitan	120 orang	50,000,000
Sosialisasi HAM	Terselenggaranya Sosialisasi HAM dilaksanakan 40 x 50 orang	Kab. Pacitan	200 orang%	55,000,000
P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba )	Terlaksananya Oprasional dan Sosialisasi Narkoba dilaksanakan 3 x 60 orang	Kab. Pacitan	180 orang	50,000,000
Sosialisasi Bahaya Radikalisme dan Terorisme dikalangan pemuda, Pelajar, Mahasiswa dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Radikalisme dan Terorisme dilaksanakan 3 kali x 50 orang	Kab. Pacitan	150 orang%	50,000,000

Kelompok Kerja Pusat Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan kebangsaan	Terlaksananya Pemahaman Wawasan kebangsaan dilaksanakan 3 kali x 50 orang	Kab. Pacitan	150 orang	75,000,000	
<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>	<b>% Pembinaan terhadap LSM, Ormas OKP dan Partai Politik</b>			<b>375,000,000</b>	
Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Terwujudnya Pemahaman Pengurus Ormas tentang UU. 17/2013 dan peraturan lain tentang keormasan yang terdiri dari 100 ormas	Kab. Pacitan	100 orang%	50,000,000	
Forum Lintas Parpol	Jumlah peserta Pendidikan Politik bagi pengurus dan kader parpol terdiri 45 orang	Kab. Pacitan	45 orang%	50,000,000	
Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada Parpol	Jumlah Parpol yang mendapatkan Bantuan Dana Keuangan sesuai Permen 77 tahun 2014	Kab. Pacitan	9 Partai Politik	85,000,000	
Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Pengendalian dan pengawasan terhadap Ormas dan LSM	Kab. Pacitan	12 Bulan	75,000,000	
Pelatihan Pengelolaan Keuangan Kepada Parpol	Jumlah peserta BinteK dan Evaluasi Bantuan Keuangan Kepada Parpol	Kab. Pacitan	27 orang	50,000,000	-
Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Pendidikan Politik dan tersusunnya Indeks Demokrasi Indonesia	Kab. Pacitan	300 orang	65,000,000	
<b>JUMLAH</b>				<b>2,615,000,000</b>	

## **4** ENUTUP

Rencana Kinerja Tahun 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan yang telah disusun untuk masa 5 ( lima ) tahun dan merupakan tindak lanjut dari implementasi Renstra tersebut.

Dengan adanya Renja maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dalam Rencana Kinerja Tahun 2017 ini, diperlukan dengan tekad dan semangat untuk mensukseskan pembangunan di Kabupaten Pacitan dengan dukungan dari semua pihak sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Semoga bermanfaat serta perbaikan berkelanjutan amat diperlukan demi suksesnya program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017.

Pacitan, Januari 2016  
**KEPALA BADAN KESATUAN BANG DAN POLITIK  
KABUPATEN PACITAN**

**SUHARYANTO,SH.,MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590530 197901 1 001